



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN RI

UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

Newsletter



Edisi Khusus: COP17, Durban 2011



Kata Pengantar

Mengawali tahun 2012, kami mengucapkan Selamat Tahun baru 2012, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua dalam bekerja untuk kemajuan negara kita. Tentunya juga bagi keluarga besar UN-REDD Programme Indonesia yang dengan giatnya memfasilitasi Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk memenuhi tahap kesiapan (*readiness*) REDD+ (*reducing emissions from deforestation and forest degradation plus* atau penurunan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan plus) di Indonesia. Lembaga kerja sama di bawah Direktorat Jenderal Planologi, yaitu UN-REDD Programme Indonesia juga telah berpartisipasi di kancah internasional seperti yang terjadi akhir tahun lalu, sebagai salah satu anggota delegasi RI ke forum negosiasi internasional tentang perubahan iklim; Konferensi Para Pihak ke-17 (*Conference of the Parties 17* atau COP17) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC). Pada COP17 di Durban, Afrika Selatan, (28 November – 9 Desember 2011) itu, UN-REDD Programme Indonesia mendukung Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, MSi, untuk memaparkan tentang kesiapan REDD+ di Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi percontohan REDD+ di Indonesia. Upaya mitigasi di tingkat sub-nasional seperti di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mempunyai kesiapan memadai, menjadi penting untuk diketahui dan didukung komunitas internasional.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan pemahaman tentang apa yang terjadi di konferensi itu, *Newsletter* UN-REDD Programme Indonesia kali ini mengambil tema khusus COP17, Durban 2011. Melalui *Newsletter* Edisi Khusus COP17 ini, diharapkan beberapa isu dan peristiwa seputar COP17, termasuk kegiatan-kegiatan yang diikuti delegasi RI dapat diketahui Pembaca. Dengan demikian, semoga Pembaca paham tentang komitmen warga dunia maupun masyarakat Indonesia melalui pemerintahnya. Selamat membaca, dan semoga *Newsletter* ini bermanfaat.

Ir. Bambang Soepijanto
Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI

Daftar Isi

01	Kata Pengantar	05	Isu Pendanaan dalam COP 17	
02	Sepatah Kata tentang COP 17	06	Indonesia Dorong Negosiasi LULUCF Segera Selesai	
02	"Indonesia harus Bangga Punya REDD+"	07	Alih Teknologi Demi Bumi	
03	Sumbangan Durban bagi REDD+	08	<i>Side Event</i> COP 17: Yang Pertama untuk Indonesia	
04	Melibatkan Perempuan dalam REDD+	08	Pertemuan <i>Forest Eleven</i> di Pertemuan COP 17, Durban	
04	Makna Sidang COP 17 bagi Implementasi REDD+ di Indonesia	09	Pertemuan Bilateral Indonesia - Australia	
05	UN-REDD Global Menampilkan Hikmah Pembelajaran bagi Negara-negara Mitra	10	Pavilion Indonesia	
		10	Adaptasi Selamatkan Sasaran Pembangunan	
		12	Delegasi Muda Semarakkan Durban	
		13	"REDD+ Belum Final, Masih Proses"	
		15	Kabar UN-REDD Programme Indonesia	
		15	Publikasi Terbaru	





Sepatah Kata tentang COP17

“Adalah kewajiban moral kita agar dunia tidak menderita karena perubahan iklim. Sudut pandang moral harus menjadi acuan dasar bagi kerja sama di sini, yang lebih penting dari argumen politik dan ekonomi” demikian Rachmat Witoelar, Ketua Delegasi Republik Indonesia (RI) untuk Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties* atau COP) *Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change* atau UNFCCC). Pernyataan itu merupakan cerminan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim demi keselamatan dunia umumnya, dan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya. Dengan komitmen itu, pemerintah Indonesia menganggap pentingnya

menentukan langkah konkret penyelamatan dunia melalui kerja sama internasional di tingkat tertinggi. Itulah sebabnya, forum negosiasi internasional yang khusus membahas isu-isu upaya mitigasi perubahan iklim, yaitu COP UNFCCC, menjadi penting untuk diikuti oleh pemerintah Indonesia.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia mengirimkan delegasinya ke COP yang kali ini diadakan di Durban, Afrika Selatan, (28 November – 9 Desember 2011). Kementerian Kehutanan RI merupakan bagian dari delegasi RI yang mengawal terutama isu penurunan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*reducing emissions from deforestation and forest degradation plus* atau REDD+).

COP 17 kali ini mengambil tema “Menyelamatkan Hari Esok, Mulai Hari Ini” (“*Saving Tomorrow Today*”). Selain mengikuti sidang dan acara tambahan (*side event*), Delegasi RI juga menampilkan berbagai presentasi, publikasi, dan promosi pelaksanaan penanganan perubahan iklim, di Pavilion Indonesia. Di Pavilion itu berbagai institusi berpartisipasi memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Indonesia terkait perubahan iklim. Diharapkan, kegiatan itu memberikan informasi kepada dunia internasional dan motivasi bagi berbagai pihak untuk terus mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim demi keselamatan bumi kita.

Dr. Yetti Rusli
Ketua Kelompok Kerja Perubahan Iklim
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia



Dr. Yetti Rusli di Pavilion Indonesia, COP 17, Durban

“Indonesia Harus Bangga Punya REDD+”

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-17 untuk Perubahan Iklim atau COP 17 dilaksanakan di Durban, Afrika Selatan, dari tanggal 28 November hingga 9 Desember

2011. Satu tujuan utama Konferensi ini adalah menetapkan kesepakatan baru untuk menangani perubahan iklim global karena periode Protokol Kyoto—yang sebelumnya merupakan kesepakatan beberapa negara untuk menangani perubahan iklim—akan berakhir pada 2012. Banyak pihak menilai COP 17 sukses membuat sejumlah pencapaian. Namun, tak sedikit pula yang menilai pencapaian itu belum cukup untuk mengatasi pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim.

Untuk mengetahui gambaran umum pelaksanaan COP 17, terutama terkait sektor kehutanan yang menjadi perhatian utama Indonesia, berikut petikan wawancara dengan Dr. Yetti Rusli, Staf Ahli bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim sekaligus Ketua Kelompok Kerja Perubahan Iklim

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI).

Apa hasil yang dicapai COP 17 di Durban, Afrika Selatan? Apakah sukses atau masih jauh dari harapan?

Indonesia sebenarnya sudah mengukir kesuksesan sejak COP 13

di Bali pada tahun 2007. Kesuksesan itu diraih dengan diakuinya empat pilar pembangunan kehutanan untuk menanggulangi perubahan iklim, yaitu menurunkan laju emisi dari kerusakan hutan, upaya konservasi, upaya menambah penyerapan karbon di hutan, dan pengelolaan hutan lestari. Sebelum Bali, hanya pilar kehutanan pertama yang diakui. Nah, di Bali tiga pilar terakhir diakui, dan Indonesia yang paling berperan dalam hal itu, dengan turunnya langsung Presiden ke Konferensi. Setelah itu, keempat pilar tersebut disebut sebagai REDD+ dan didokumentasikan di dalam Kesepakatan Kopenhagen (*Copenhagen Accord*, Denmark, COP15, 2009). Jadi, REDD+ adalah empat pilar pembangunan kehutanan. Dengan keberhasilan di Bali, Indonesia kini tinggal mengawal negosiasi-negosiasi agar terus mengalami kemajuan. Sementara itu, kesiapan di tingkat nasional juga terus berjalan agar sesuai dengan arah pembangunan.

Lalu bagaimana kemajuan REDD+ di Durban?

Di Durban, banyak dibicarakan sisi

pendanaan untuk REDD+. Bagi saya, itu juga merupakan kemajuan di sektor kehutanan. Kalau untuk sektor lain mungkin masih pelan, apalagi negara-negara maju masih berdebat untuk menentukan target pengurangan emisi mereka. Tapi kita harus memahami, sebab ekonomi dunia masih dalam posisi sulit. Dalam kondisi seperti itu, mereka tak bisa memaksakan diri untuk menurunkan emisi. Itu akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi.

Apa agenda Indonesia di Durban?

Di Durban, Kementerian Kehutanan RI masih terus mengawal berbagai negosiasi dan melihat banyak kemajuan, misalnya dalam hal kerangka pengaman (*safeguard*) dan pendanaan. Akan tetapi, memang perkembangan masalah pendanaan masih dini. Sektor

hutan adalah unggulan Indonesia. Jadi Indonesia harus bangga punya REDD+. Bagi Indonesia, intinya hanya dua, menanam pohon sebanyak-banyaknya lalu memelihara hutan, kemudian mendatangkan investasi, dan menciptakan pasar untuk itu. Semua bisa melakukan itu, dari masyarakat hingga pengusaha. Yang penting nilai tambahnya dari kegiatan itu harus lebih tinggi. Kalau harga karbonnya lebih rendah daripada harga kayu, ya *mending nggak* usah dagang karbon. Tapi kalau (harga karbon-red) lebih tinggi, pengusaha kayu pun akan tertarik berbisnis karbon.

Apa yang membuat COP 17 berbeda dengan COP lain?

Bagi delegasi RI, yang berbeda kali ini

adalah adanya acara tambahan (*side event*) dan Pavilion Indonesia. Di kedua forum itu Indonesia bisa menampilkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh bangsa ini, pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha, terkait penurunan emisi gas rumah kaca. Presentasi-presentation itu tak hanya menyajikan pengalaman di lapangan, tapi juga data yang ditunjang oleh riset dan analisis akademik, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat (*community*), sehingga menjadi bukti bahwa Indonesia memang mampu. Hal itu tentunya menarik bagi banyak pihak yang mengikuti presentasi-presentation tersebut. Bagi kehutanan Indonesia, Pavilion dan *side event* menjadi wadah pembuktian bahwa REDD+ di Indonesia betul-betul berada pada baris terdepan di dunia.



Dr. Nur Masripatin

Sumbangan Durban bagi REDD+

Deforestasi dan degradasi hutan menghasilkan sekitar 20% emisi gas rumah kaca (GRK)*. Untuk itu, pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan plus peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan atau yang dikenal dengan REDD+, diakui sebagai salah satu pendekatan penting mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan. REDD+ secara resmi disebut sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim pada COP 13 di Bali 2007. Sejak itu, perkembangan negosiasi para pihak terkait inisiatif ini mengalami kemajuan cepat meskipun tak secepat yang diharapkan karena banyak terkait dengan agenda lain yang berjalan cukup lamban.

Pada COP 17 di Durban, Afrika Selatan (2011), cara penetapan tingkat emisi referensi (*reference emissions level/reference level* atau REL/RL), dan petunjuk pembangunan kerangka pengaman (*safeguard*) telah disepakati dan menjadi keputusan COP 17.

Dalam keputusan tentang kerangka pengaman, negara berkembang termasuk Indonesia diminta menyediakan ringkasan informasi mengenai pelaksanaan kerangka pengaman. Ringkasan tersebut diharapkan bisa menjadi jaminan pelaksanaan REDD+, agar program REDD+ mengikuti ketujuh pengaman** yang telah diputuskan di Cancun, termasuk dilakukannya REDD+ secara transparan dan tidak mengancam hak masyarakat adat dan/atau lokal yang tinggal di dalam atau sekitar hutan.

Meski demikian, ada beberapa hal yang belum bisa dituntaskan di Durban. Sistem pemantauan untuk hutan nasional masih menunggu negosiasi pada pertemuan berikutnya. Selain itu, opsi pendanaan bagi REDD+ pun masih perlu negosiasi lanjutan.

Meskipun masih harus menunggu hingga COP di Qatar pada akhir 2012 dalam hal pembiayaan, Indonesia tetap bersiap diri. Menurut Dr. Nur Masripatin, Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Indonesia perlu menyiapkan perangkat implementasi REDD+ secara terencana dan terintegrasi untuk memasuki fase implementasi penuh dari aksi berbasis hasil. Kesiapan itu harus tercermin dalam tingkat emisi referensi nasional, sistem pemantauan hutan nasional, sistem

informasi perlindungan nasional, serta pengukuran, pelaporan, dan verifikasi nasional. Indonesia, tambah Nur, juga harus merumuskan kebijakan baru untuk mengakomodasi pembiayaan REDD+ sesuai keputusan konferensi para pihak. "Indonesia harus memperjelas posisi REDD+ dalam keseluruhan program pembangunan nasional, dengan target penurunan emisi sebanyak 26%, serta potensi penurunan di atas 41 %," papar Nur.

*Data dari the Intergovernmental Panel on Climate Change

**Tujuh kerangka pengaman REDD+ yang diputuskan di COP 16, Cancun, 2010: 1) konsisten dengan program-program kehutanan yang ada dan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional; 2) struktur pengelolaan hutan yang transparan dan efektif; 3) menghargai pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan lokal; 4) partisipasi yang penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan yang terkait; 5) perlindungan atas hutan alami dan keanekaragaman hayati; 6) menjawab risiko pengalihan; 7) menjawab risiko perpindahan emisi.

Melibatkan Perempuan dalam REDD+

Yani Septiani, salah satu anggota Kelompok Kerja (pokja) Pengarusutamaan Gender dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) yang ikut terlibat dalam negosiasi COP 17 di Durban, melihat persoalan kesetaraan gender sudah menjadi perhatian utama pemerintah. Kaum perempuan telah dilindungi secara hukum, bahkan perempuan di Indonesia telah memiliki kementerian tersendiri. Pengarusutamaan gender juga menempati posisi penting dalam kebijakan politik. Kini setiap kementerian memiliki kelompok kerja terkait kesetaraan gender, termasuk di Kementerian Kehutanan RI. Pendek kata, "Di Indonesia sebenarnya kesetaraan gender tidak ada masalah jika dibandingkan dengan negara lain," kata Yani. Namun, Yani mengakui masih banyak orang di Indonesia yang mengidentifikasi urusan hutan sebagai pekerjaan kaum pria. Selain itu, secara umum, kaum perempuan Indonesia belum begitu terwakili di kancah politik. Misalnya, perempuan masih minoritas di tingkat senior pemerintahan. Di parlemen, persentase keterwakilan perempuan pun belum mencapai angka idaman



Yani Septiani di forum pengarusutamaan gender, COP 17, Durban



30%. Di tingkat lokal, persepsi kultural tertentu juga terkadang menghambat peran perempuan dalam memimpin pengelolaan hutan. Di lain pihak, secara historis, kaum perempuan di beberapa wilayah seperti Aceh dan Sumatera Barat memainkan peran signifikan dalam pengelolaan hutan.

Faktor-faktor di atas, menurut Yani, menjadikan perempuan jarang sekali terlibat dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan terkait proyek kehutanan, termasuk REDD+ (*reducing emissions from deforestation and forest degradation plus* atau penurunan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan plus). Padahal, populasi perempuan lebih besar dibandingkan pria. Hal ini berarti potensi perempuan lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). REDD+ merupakan mekanisme yang menawarkan manfaat kelestarian hutan bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk perempuan. Oleh sebab itu,

"Konsep gender diperlukan dalam REDD+ berdasarkan kondisi kerja dalam sektor kehutanan. Pria dan perempuan harus memperoleh manfaat yang sama dari pengelolaan lestari sumber daya alam dan hutan," tegas Yani.

Untuk itu, Yani mengusulkan beberapa langkah. Pertama, mengembangkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender untuk mempromosikan pengembangan hutan yang sadar gender. Kedua, membangun kesadaran untuk melihat perempuan sebagai pemangku kepentingan khusus dalam setiap proses dan tingkat konsultasi. Ketiga, menyertakan perangkat gender, seperti analisis gender dalam proyek karbon. Keempat, melibatkan masyarakat adat dan lokal, masyarakat yang bergantung pada hutan, dan kelompok perempuan dalam strategi nasional REDD+. Keempat langkah itulah yang Indonesia tawarkan dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP) ke-17 di Durban, Afrika Selatan (28 November – 9 Desember 2011).

Makna Sidang COP 17 bagi Implementasi REDD+ di Indonesia

Negosiasi isu REDD+ di COP 17 Durban, Afrika Selatan, berlangsung pada tanggal 28 November-10 Desember 2011 untuk membahas dua kelompok isu REDD+ yang dimandatkan COP 16 Cancún (Meksiko, 2010), yaitu negosiasi metodologi teknis melalui SBSTA (*Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* atau Badan Pemberi Saran Bidang Ilimah dan Teknologi) dan negosiasi pendanaan melalui AWG-LCA (*The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action* atau Kelompok Kerja Aksi Kerja Sama Jangka Panjang).



Zaky Prabowo dari UKP4

Terkait metodologi teknis, kesepakatan telah dicapai mengenai informasi kerangka pengaman dan penentuan tingkat emisi referensi/tingkat referensi (*reference emission level/reference level* atau REL/RL) untuk REDD+. Akan tetapi, negosiasi modalitas untuk sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (*measurement, reporting and verification* atau MRV) yang seharusnya disepakati di Durban, tidak sempat terselesaikan. Di sisi lain, perkembangan terlihat dalam negosiasi pendanaan yang disepakati

semua negara. Kesepakatan itu terkait adanya berbagai sumber pendanaan untuk REDD+, yang meliputi dana publik dan swasta, bilateral dan multilateral, juga pendekatan pasar dan non-pasar. Kesepakatan negosiasi Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) juga menyebutkan adanya 'jendela' khusus untuk REDD+ sebagai bagian dukungan dana mitigasi untuk negara berkembang.

Di Indonesia, Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ yang dibentuk Presiden Republik Indonesia

mendorong implementasi REDD+ di provinsi-provinsi berhutan dan berlahan gambut. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus melanjutkan dan memperkuat kepemimpinannya dalam mendorong kesepakatan bersama tentang REDD+ dalam COP. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat menunjukkan contoh nyata implementasi REDD+ yang bertanggung jawab dan berdampak bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. (Zaky Prabowo, Staf Kepala UKP4/Tim Kerja Satgas REDD+).

UN-REDD Global Menampilkan Hikmah Pembelajaran dari Negara-negara Mitra



UN-REDD Programme Indonesia di acara tambahan UN-REDD Global, COP 17, Durban

Pada COP 17 di Durban (30 November 2011), UN-REDD Programme berpartisipasi mengadakan acara tambahan bertema "Membuat Kemajuan dengan REDD+: Menerapkan Hikmah Pembelajaran untuk Mendorong Kesuksesan." Acara ini dihadiri oleh lebih dari 120 peserta yang merupakan kalangan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dari 40 negara. Fokus acara ini adalah hikmah pembelajaran dari kegiatan-kegiatan terkait kesiapan REDD+ di negara-negara UN-REDD di Afrika, Asia-Pasifik, Amerika Latin, dan negara-negara Kepulauan Karibia.

Dr. Yemi Katerere dari Kantor Sekretariat UN-REDD Programme, Salisu Dahiru dari Nigeria, Ir. Yuyu Rahayu, MSc. yang merupakan National Programme Director UN-REDD Programme Indonesia, Joelle Chassard dari World Bank, Ricardo Ulate dari Costa Rica, dan Vicky Tauli-Corpuz dari TEBTEBBA (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education) memberikan presentasi mereka. Acara itu difasilitasi oleh Maria Sanz-Sanchez dari Kantor Sekretariat UNFCCC. Nigeria dan Indonesia memberikan ringkasan tentang pengalaman masing-masing negara dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan REDD+. Ir. Yuyu Rahayu, MSc. dari Indonesia menjelaskan tantangan-tantangan yang telah dihadapi dan diatasi Indonesia dalam mengoordinasi berbagai inisiatif terkait REDD+. Dijelaskan pula bahwa berkenaan dengan itu, peran UN-REDD Programme menjadi penting dalam memfasilitasi konsultasi-konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan multipihak.

UN-REDD Programme juga menggunakan kesempatan itu untuk meluncurkan serangkaian publikasi, yaitu buku-buku Hikmah Pembelajaran (*Lessons*

Learned series) dan Rangkuman Kebijakan (*Policy Brief*). Publikasi-publikasi tersebut tersedia dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol di situs <http://unredd.wordpress.com>. (oleh Sekretariat UN-REDD Programme, Jenewa, Swiss).



Isu Pendanaan dalam COP

Pada COP ke-17 di Durban, Afrika Selatan, isu pendanaan (*financing*) dibahas di empat sesi. Mengingat sifatnya yang lintas isu, pendanaan juga menjadi satu topik pada perundingan agenda lain, termasuk mitigasi, adaptasi, teknologi, dan opsi pendanaan REDD+ (*reducing emissions from deforestation and forest degradation* atau penurunan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan).

Pada perundingan mengenai dana jangka panjang (*long-term finance/LTF*), terdapat kesenjangan pandangan yang sangat besar antara kelompok negara maju dan negara miskin/berkembang. Di satu sisi, kelompok negara miskin (*least developed countries* atau LDC) memiliki proposal yang dianggap

ekstrem oleh negara maju. Kelompok tersebut menuntut negara maju menyediakan LTF melalui mekanisme pembagian beban (*burden sharing mechanism*) dengan jumlah yang diberikan berdasarkan kontribusi nilai skala (*assessed scale contribution*). Masalahnya, karena negara memiliki kedaulatan, hal tersebut tak dapat

ditentukan secara sepihak oleh lembaga multilateral yang berwenang ke tingkat bawah (*top-down*). Negara berkembang menuntut hal tersebut demi menjamin kepastian dan keberlanjutan LTF. Hingga pertemuan di Durban, negara maju belum juga bersedia mengalokasikan komitmen LTF sebesar USD100 miliar per tahun



Dr. Suzanty Sitorus dalam perundingan isu pendanaan.

pada 2020, yang telah diumumkan melalui *Copenhagen Accord* (COP 15, 2009) dan kemudian dikukuhkan oleh keputusan COP 16 di Cancún, Meksiko (2010). Proposal kontroversial juga datang dari pihak negara maju, khususnya Amerika Serikat. Mereka mengusulkan bahwa LTF juga berasal dari negara berkembang, khususnya yang telah mengalami kemajuan ekonomi.

Satu-satunya proposal yang dapat diterima oleh kedua pihak—meski setelah melalui perundingan dan

pelobian yang alot—adalah proposal LDC dan Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil (*The Alliance of Small Island States/AOSIS*) mengenai program kerja 2012 yang mengusulkan penyelenggaraan lokakarya untuk mengidentifikasi sumber LTF. Negara maju yang tadinya menolak, akhirnya setuju dengan syarat hasil lokakarya tidak akan mendikte keputusan COP tentang bagaimana negara maju harus memobilisasi LTF.

“Bagi Indonesia, keputusan Cancún yang menetapkan komitmen negara

maju terkait penyediaan pendanaan, harus segera dilaksanakan. Harapan kami juga ada kejelasan dalam hal mobilisasi dana jangka panjang dan alokasinya, mekanisme Dana Iklim Hijau (*Green Climate Fund*) segera beroperasi, demikian pula Panitia Tetap (Pendanaan) atau *Standing Committee (on Finance)*. Semua itu harus operasional untuk memastikan kecukupan dana bagi penanganan perubahan iklim di negara berkembang,” jelas Dr. Suzanty Sitorus dari Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Indonesia Dorong Negosiasi LULUCF Segera Selesai

Negara berkembang seperti Indonesia masih memerlukan pembukaan lahan dan konversi hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana, pemukiman, dan pemekaran wilayah. Oleh sebab itu, tak heran jika sebagian besar emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor tata guna lahan dan kehutanan atau disebut LULUCF (*Land Use, Land Use Change, Forestry*) disumbang negara berkembang. Menurut studi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pada tahun 2010, emisi GRK akibat alih guna lahan dan hutan pada 2005 di Indonesia sekitar 85% dari total emisi nasional. Hingga 2030, sumber emisi utama Indonesia diperkirakan masih berasal dari alih guna lahan dan hutan. Sebaliknya, di negara maju, tata guna lahan relatif telah stabil, tidak banyak berubah. Alhasil, untuk kawasan hutan yang dikelola (*managed forest*), misalnya, lebih banyak berperan sebagai penyerap karbon daripada sebagai sumber emisi GRK.

Menurut Dr. Doddy S. Sukadri dari DNPI, upaya pencegahan perubahan iklim melalui sektor tata guna lahan dan kehutanan di Indonesia terkait tiga hal: [1] kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim; [2] transisi menuju pembangunan ekonomi rendah karbon; dan [3] kesempatan melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 disebutkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan akan diarahkan kepada enam tujuan utama, yaitu untuk 1) konservasi; 2) perlindungan hutan alam dan lahan gambut; 3) rehabilitasi lahan kritis pada daerah aliran sungai (DAS); 4) pengusahaan hutan skala besar; 5) pengusahaan hutan skala kecil, dan; 6) penggunaan non kehutanan.

“Untuk tujuan yang terakhir ini, total luas hutan negara akan dikurangi dari sekitar 130 juta hektar yang saat ini telah ditetapkan, menjadi sekitar 112 juta hektar dalam dua puluh tahun ke depan,” kata Doddy. Meski demikian, tantangan yang dihadapi pemerintah masih cukup besar. Salah satunya adalah kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada kepala daerah. Pertambahan liar yang semakin meningkat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam mengatur tata guna lahan. Pemanfaatan kawasan bergambut untuk hutan tanaman industri, perkebunan, dan lain-lain juga belum diatur dengan baik. Contoh tersebut perlu diselesaikan dengan baik agar emisi dari alih guna lahan dan hutan bisa dikendalikan.

Dalam wadah negosiasi global, LULUCF berada di bawah agenda Kelompok Kerja *Ad-hoc* AWG-KP (*Working Group on Further Commitments for Annex I*



Dr. Doddy S. Sukadri, Ketua Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan (LULUCF), DNPI

Parties under the Kyoto Protocol atau Kelompok Kerja untuk Komitmen Selanjutnya bagi Negara Pihak Annex I di bawah Protokol Kyoto), dan isu sektor tata guna lahan dan kehutanan hanya berlaku bagi negara maju yang mencoba memenuhi komitmen pengurangan emisi. Keikutsertaan negara berkembang dalam negosiasi ini lebih untuk menjaga pemenuhan komitmen negara maju dan potensi implikasinya bagi negara berkembang.

“LULUCF yang dinegosiasikan di bawah AWG-KP mungkin akan dihubungkan dengan penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang dinegosiasikan di dalam kelompok kerja lain, yakni AWG-LCA (*The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action* atau Kelompok Kerja Aksi Kerja Sama Jangka Panjang - red),” tambah Doddy.

Negosiasi LULUCF telah berjalan selama enam tahun, namun perkembangannya berjalan amat lambat. Kelambanan ini dikarenakan beberapa hal, antara lain perhitungan emisi yang memerlukan data terpercaya, pendekatan metode

perhitungan, dan pemahaman mendasar terhadap peran hutan sebagai sumber emisi dan serapan karbon. Menurut Doddy, Indonesia mendorong agar negosiasi LULUCF dapat segera diselesaikan karena

sudah terlalu lama. Indonesia juga meminta negosiasi LULUCF tidak selalu dikaitkan dengan isu lain, khususnya jumlah pengurangan emisi negara maju. "Indonesia ingin LULUCF diimplementasikan di tanah

air dalam bentuk dan intensitas yang berbeda. Ini mempertimbangkan porsi tutupan hutan yang ada dan potensi pembangunan," demikian Doddy menambahkan.

Alih Teknologi Demi Bumi

Umat manusia dari waktu ke waktu menemukan dan memanfaatkan teknologi yang semakin memberikan kenyamanan hidup lebih tinggi. Namun, teknologi tersebut diperoleh dengan konsumsi energi yang semakin besar. Semakin besar pemakaian energi, semakin besar pula gas rumah kaca (GRK) yang dikeluarkan ke atmosfer dan menimbulkan pemanasan global. Dampak lanjutannya adalah perubahan iklim yang terjadi secara global. Ia memaksa kita untuk mengubah pola hidup, baik

dalam produksi maupun konsumsi. Oleh sebab itu, kita harus mencari teknologi yang tepat sehingga dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global.



Persoalannya, tak semua negara memiliki teknologi yang tepat. Dan tak semua negara pula memiliki kemampuan melakukan inovasi teknologi baru untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Negara-negara tersebut perlu dibantu untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Bantuan tak hanya berbentuk transfer perangkat keras, tapi juga pengembangan kapasitas inovasi.

Persoalan pengembangan dan alih teknologi telah masuk dalam arena negosiasi global Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP). Pada COP 13 di Bali, Indonesia (2007), ditetapkan rencana aksi "Bali Action Plan". Di dalamnya, persoalan pengembangan dan alih teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ditangani oleh badan pembantu Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) bidang saran ilmiah dan teknologi atau SBSTA dan badan pembantu bidang implementasi atau SBI.

Lalu pada COP 14 di Poznań, Polandia (2008), ditetapkan Program Strategis Poznań untuk Alih Teknologi

(Poznań Strategic Programme on Technology Transfer). Pada program itu, ada langkah-langkah untuk membantu negara berkembang dalam memenuhi kebutuhan akan teknologi ramah lingkungan. COP 16 di Cancún, Meksiko (2010), menetapkan sebuah mekanisme teknologi yang terdiri dari Panitia Eksekutif Teknologi (*Technology Executive Committee* atau TEC) serta Pusat dan Jejaring Teknologi Iklim (*Climate Technology Centre and Network* atau CTCN).

Lantas bagaimana, perkembangan pengembangan dan alih teknologi ini dibahas dalam COP 17 di Durban, Afrika Selatan (2011)? Berikut petikan wawancara dengan Widyatmini Sih Winanti, Sekretaris Kelompok Kerja Alih Teknologi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Bagaimana isu pengembangan dan alih teknologi ini dibahas pada COP 17 di Durban?

Pertama, lembaga donor besar Fasilitas Lingkungan Global atau *Global Environment Facility* (GEF) melaporkan kemajuan pelaksanaan Program Strategis Poznań untuk Alih Teknologi. Kemudian, ada

pula laporan terkait lokakarya Penilaian Kebutuhan Teknologi (*Technology Need Assessment/TNA*) dari tiap negara. Kedua, dibahas operasionalisasi CTCN pada 2012. Untuk itu, akan dilakukan pemilihan tuan rumah bagi CTCN dan juga badan pengatur CTCN.

Terkait pendanaan alih teknologi, keputusan apa yang dibuat di COP 17?

Badan Pembantu bidang Implementasi atau *Subsidiary Bodies for Implementation* (SBI) mendorong negara-negara untuk mengajukan proposal alih teknologi kepada GEF, khususnya untuk adaptasi perubahan iklim. SBI juga mengundang GEF untuk mendukung operasionalisasi CTCN pada 2012.

Apa yang belum berhasil diputuskan akhir tahun lalu?

Dalam hal badan pengatur CTCN, terjadi perbedaan pendapat. Ada kelompok yang mengusulkan berbentuk badan tapi ada yang mengusulkan hanya berbentuk sekretariat. Akhirnya, keputusan mengenai hal ini ditunda hingga COP 18 di Qatar tahun ini.

Side Event COP 17: Yang Pertama untuk Indonesia

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perubahan Iklim, atau yang dikenal dengan *Conference of the Parties (COP)*, menyediakan ruang bagi acara tambahan yang disebut *side event*. *Side event* menjadi elemen penting bagi konferensi tahunan tersebut karena memberi peluang bagi penyebaran informasi, peningkatan kapasitas, dan diskusi kebijakan. Pada COP sebelumnya, *side event* dijadwalkan di luar jam negosiasi. Namun karena permintaan yang tinggi, pada COP 17 di Durban, Afrika Selatan (28 November-9 Desember 2011), *side event* dijadwalkan hampir sepanjang hari sehingga jumlah total ada 220 *side event* yang digelar di Durban.

Indonesia tak ketinggalan memanfaatkan *side event* di Durban. Bagi Indonesia, inilah partisipasi *side event* pertama dan terlengkap di luar negeri. Untuk *side event* delegasi Republik Indonesia (RI) di Durban, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ditunjuk sebagai penanggung jawab.

Menurut Endah Murniningtyas, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, tema yang diangkat Indonesia dalam *side event* di Durban adalah "penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)". Tema ini tepat sebab dalam COP 17, pembangunan ramah lingkungan dan rendah emisi GRK menjadi perhatian utama. Selain itu,

Indonesia juga memiliki komitmen paling kuat dibandingkan negara lain terkait pengurangan GRK.

"Indonesia telah mengambil langkah lebih maju dibandingkan negara lain. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berkomitmen mengurangi emisi GRK sebesar 26% dari sumber daya sendiri, dan tambahan 15% dengan bantuan internasional. Ini disandingkan bersama target pertumbuhan ekonomi 7% per tahun," jelas Endah.

Side event Indonesia dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2011 di Ruang Indwe River, Durban Exhibition Center. Indonesia mengundang pembicara Jerman dan Belanda yang dimintai tanggapan terhadap apa yang telah dilakukan Indonesia dan bagaimana pengalaman mereka



Ir. Yuyu Rahayu MSc dari Kementerian Kehutanan RI dan Dr. Endah Murniningtyas dari Bappenas mengisi acara *side event*

bekerjasama dengan Indonesia untuk menangani perubahan iklim. Selain itu, sebagai pembanding, Indonesia mengundang Vietnam yang seperti Indonesia, baru belajar menangani masalah perubahan iklim. Sebagai tambahan, Ir. Yuyu Rahayu, MSc. mewakili Kementerian Kehutanan RI menyampaikan paparan tentang kegiatan mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan.

Endah menyatakan bahwa *side event* yang diselenggarakan delegasi Indonesia berhasil menarik sekitar 160 peserta. Bagi Indonesia, hal ini positif sebab menunjukkan ketertarikan pihak luar terhadap upaya Indonesia menangani perubahan iklim. "Melalui *side event*, apa yang kita lakukan dalam menangani perubahan iklim diakui dunia. Acara semacam itu menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain," kata Endah.

Pertemuan Forest Eleven di Pertemuan COP 17, Durban

Pada tanggal 29 November 2011, dilaksanakan pertemuan koordinasi antara negara-negara Forest Eleven (F-11) di sela-sela pertemuan UNFCCC COP 17 di Durban. Pertemuan dipimpin oleh Duber Diaz Carmona, pemimpin negosiator dari Costa Rica sebagai ketua F-11 saat ini, didampingi oleh pemimpin negosiator Indonesia, Tazwin Hanif. Pertemuan dihadiri

oleh delegasi anggota F-11 yang menghadiri pertemuan UNFCCC.

Berdirinya F-11 adalah inisiatif Presiden Republik Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB dan Acara Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di New York, Amerika Serikat (24 September 2007). Forest-11 adalah kelompok negara-negara yang memiliki hutan tropis terbesar



Dr. Teguh Rahardja, Wakil Direktur Pusat Kerja sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan RI

di dunia dengan anggota yang terdiri dari Brazil, Costa Rica, Gabon, Guatemala, Guyana, Indonesia, Kameroun, Kolombia, Kongo, Malaysia, Papua New Guinea, Peru, Republik Demokratik Kongo, dan Suriname.

Pertemuan F-11 di Durban membahas dua agenda utama yaitu: (1) keterlibatan F-11 dalam pertemuan UNFCCC COP 17 melalui penyampaian pernyataan bersama pada pertemuan UNFCCC; dan (2) tindak lanjut keputusan pertemuan *Ministerial Luncheon* (keputusan tingkat menteri) di New York pada tanggal 22 Desember 2011 untuk menyelenggarakan pertemuan

tinggi F-11 pada Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pembangunan Lestari "Rio+20" bulan Juni 2012 mendatang.

Negara-negara F-11 sangat menghargai draf pernyataan bersama yang telah disiapkan oleh Indonesia dan Costa Rica. Untuk finalisasi pernyataan bersama itu, diadakan pertemuan antara

Indonesia, Costa Rica, dan Brazil pada tanggal 1 Desember 2011 di Sekretariat Delegasi RI. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2011 untuk pertama kalinya F-11 menyampaikan pernyataan bersama dalam forum resmi UNFCCC yang merupakan forum yang sangat penting di bidang lingkungan hidup. Diharapkan pencapaian tersebut dapat lebih meningkatkan kerja sama F-11.



Pertemuan Bilateral Indonesia – Australia

Pertemuan Bilateral Republik Indonesia (RI) dan Australia di sela-sela COP 17 UNFCCC dilakukan pada tingkat negosiator dan antar menteri. Pada pertemuan antar negosiator, Australia menanyakan pandangan Indonesia terkait Dana Iklim Global (*Global Climate Fund/GFC*), dan membahas rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan *Cartagena Dialogue**—jejaring negara-negara yang bekerja untuk mengupayakan solusi konstruktif bagi negosiasi-negosiasi COP—pada akhir tahun 2012. Australia mengharapkan agar pertemuan dilaksanakan sebelum Pre-COP dan siap membantu pelaksanaannya. Selain itu, dibicarakan pula kerja sama bilateral mengenai upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) akibat deforestasi dan degradasi hutan plus (*reducing emissions from deforestation and forest degradation plus* atau **REDD+**) yang selama ini sudah terjalin, khususnya mengenai proyek percontohan untuk diperlihatkan kepada kalangan yang lebih luas.

Pada pertemuan bilateral tingkat menteri dibahas mengenai prospek mekanisme pembangunan bersih (*clean development mechanism* atau CDM) di Indonesia, upaya pengembangan kerja sama REDD+, dan perkembangan negosiasi dalam COP 17. Australia tertarik menjalankan proyek-proyek CDM di Indonesia karena wilayah hutannya yang luas dan adanya kepentingan yang sama antara Indonesia dan Australia. Terkait perkembangan negosiasi dalam COP 17 UNFCCC, kedua negara sama-sama mengupayakan tercapainya suatu hasil konkret dari COP 17 UNFCCC.

Selain itu, pada pertemuan bilateral Indonesia – Australia di bidang kehutanan, didiskusikan mengenai Kemitraan Karbon Hutan Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership/IAFCP*) yang terkait dengan pembangunan kapasitas dalam bidang inventori. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ir. Yuyu Rahayu, MSc. selaku Project Director IAFCP. Kerja sama telah berjalan dengan baik dan harus didorong terus agar tidak kehilangan momentum dinamika negosiasi. Pembicaraan mengenai isu kehutanan akan ditindaklanjuti dengan kunjungan ke Indonesia



Ir. Yuyu Rahayu, MSc dari UN-REDD Programme Indonesia memimpin diskusi

tahun ini. (Teguh Rahardja/Nefritari Sari, Pusat Kerja sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan RI).

**Cartagena Dialogue* terdiri dari: Antigua & Barbuda, Australia, Bangladesh, Belanda, Belgia, Chile, Colombia, Costa Rica, Denmark, Ethiopia, Ghana, Guatemala, Indonesia, Jerman, Kepulauan Marshall, Kerajaan Inggris, Komisi Eropa, Malawi, Maldives, Meksiko, Norwegia, Panama, Peru, Prancis, Republik Dominika, Rwanda, Samoa, Selandia Baru, Spanyol, Tanzania, Thailand, Timor-Timur, Uni Eropa, dan Uruguay.

Pavilion Indonesia

Pavilion Indonesia merupakan kegiatan kolaboratif delegasi Republik Indonesia (RI) yang diadakan selama COP 17 UNFCCC di Durban, Afrika Selatan, dari tanggal 28 November sampai dengan 9 Desember 2011. Kegiatan berupa ruang pameran seluas 170 m² itu melibatkan Pemerintah RI, sektor swasta, masyarakat sipil, pemuda, kalangan akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Bersama-sama, semua pihak itu menampilkan upaya-upaya Indonesia—termasuk melalui kerja sama bilateral dan multilateral—dalam memerangi perubahan iklim. Sebelumnya, Pavilion Indonesia pernah diadakan pada COP13 di Bali (2007) ketika Indonesia bertindak sebagai tuan rumah konferensi UNFCCC tahunan ini. Pavilion Indonesia yang kedua ini mengambil tema “Indonesia, Solution for The World”. Konsep ini menggambarkan semangat yang jelas atas solusi pembangunan lestari dalam upaya mendorong keseimbangan antara agenda sosial, ekonomi, dan lingkungan.



Paviliun Indonesia di COP 17, Durban, yang didukung fungsi multi media



Gubernur Sulawesi Tengah (kiri) memberikan presentasi di Pavilion Indonesia

Kegiatan di Pavilion Indonesia meliputi beberapa bagian utama, yaitu:

1. Pameran aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sudah dilaksanakan di Indonesia pada tingkat lokal, regional, maupun nasional
2. Presentasi dan diskusi mengenai tantangan dan keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia
3. Penayangan berbagai film pendek tentang perubahan iklim yang diproduksi oleh pemangku kepentingan multi pihak di Indonesia
4. Peningkatan kapasitas delegasi anak dan pemuda Indonesia serta pergelaran budaya

Pengunjung Pavilion Indonesia diperkirakan sekitar 150 per hari. Para pengunjung itu menerima informasi berupa publikasi cetak atau elektronik di ruang pameran yang merupakan kombinasi teknologi modern dan budaya tradisional Indonesia. Khusus untuk upaya penurunan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi

hutan plus (*reducing emissions from deforestation and forest degradation plus* atau REDD+), Pavilion Indonesia menampilkan tema REDD+ pada tanggal 1 dan 2 Desember 2011.

Menurut Ir Agus Justianto, Sekretaris Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan RI yang menangani

Pavilion Indonesia, Pavilion itu diselenggarakan untuk memperkuat citra internasional Indonesia. "Kami menampilkan capaian dan upaya Indonesia dalam mencegah dan mengelola dampak perubahan iklim," kata Agus.

Kementerian Kehutanan, menurut Agus, akan selalu mendukung inisiatif positif yang ada, termasuk kemungkinan menyelenggarakan Pavilion Indonesia pada COP 18 di Qatar akhir 2012. "Pavilion Indonesia berfungsi sangat baik sebagai media komunikasi untuk memublikasikan secara langsung capaian dan

upaya Indonesia kepada dunia internasional. Peserta internasional tertarik terhadap substansi yang disajikan dalam seminar, dan m e n g a g u m i upaya positif serta kesiapan Indonesia yang sudah cukup jauh dalam menyikapi isu perubahan iklim. Harapannya, negara-negara di dunia yang melihat upaya yang telah dilakukan Indonesia

dapat memberi dukungan kepada negeri ini," papar Agus.



Suasana konferensi pers di Pavilion Indonesia COP 17, Durban

Adaptasi Selamatkan Sasaran Pembangunan

Adaptasi perubahan iklim merupakan upaya penyesuaian sistem sosial, sistem alam, dan sistem tata kelola pemerintahan dalam merespon dampak perubahan iklim. Akan tetapi, Indonesia dan negara-negara berkembang lain memiliki keterbatasan dalam hal akses pendanaan, akses teknologi, dan kemampuan terkait pembangunan kapasitas (*capacity building*) untuk adaptasi. "Padahal, isu perubahan iklim selalu berkaitan dengan ketiga hal tersebut," ujar Ari Mochamad, Koordinator Perunding Isu Adaptasi Delegasi Republik Indonesia (RI) pada Konferensi PBB ke-17 untuk Perubahan Iklim atau COP 17 di Durban, Afrika Selatan (2011).

Pada COP 17 di Durban, dibahas secara intensif empat agenda adaptasi: [1] Pembentukan Komisi Adaptasi; [2] Rencana Adaptasi Nasional; [3] Kerugian dan Kerusakan (*loss and damage*); dan [4] Kelanjutan Program Nairobi tentang Dampak Perubahan Iklim yang dihasilkan COP 12 di Nairobi, Kenya (2006). Hasilnya, telah dicapai konsensus dalam beberapa rancangan keputusan, seperti kesepakatan untuk memulai aktivitas Komisi Adaptasi setahun ke depan. Aktivitas

itu akan dilaporkan pada COP18 di Doha, Qatar (Desember 2012). "Lingkup kerja Komisi Adaptasi adalah menyiapkan pedoman dan bantuan teknis, menyebarkan atau membagi informasi pengetahuan, mendorong kerja sama di tingkat nasional, regional dan internasional, serta memberikan rekomendasi," papar Ari.

Kesepakatan lainnya yang dicapai di Durban adalah pelaksanaan aksi adaptasi harus dilakukan sesuai ketentuan konvensi, mengikuti

kepentingan nasional, memerhatikan isu gender, melibatkan semua pemangku kepentingan, transparan, dengan memprioritaskan kelompok masyarakat serta ekosistem yang rentan. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan isu kelautan dan pertanian sebagai hal yang perlu mendapat tekanan dan dapat diadopsi ke dalam perundingan isu adaptasi di Durban.

Ari menambahkan, "Adaptasi menyelamatkan sasaran pembangunan agar tidak gagal oleh adanya perubahan iklim. Oleh sebab itu, isu adaptasi perubahan iklim juga harus dapat diadopsi pada tingkat daerah." Namun menurut Ari, masih ada satu persoalan, yakni ketiadaan basis data perubahan iklim. Ini membuat para pemangku kepentingan sulit menilai sejauh mana kegiatan adaptasi telah berdampak signifikan. Untuk itu, Kelompok Kerja Adaptasi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) akan mendorong pembangunan basis data adaptasi, yang diharapkan membantu para pemangku kepentingan upaya adaptasi memastikan upaya itu berdampak maksimal.

Delegasi Muda Semarakkan Durban

Pemerintah Indonesia merupakan pelopor dalam mengikutsertakan pemuda dalam COP, sejak COP 15 di Kopenhagen, Denmark (2009), berlanjut ke COP 16 di Cancún, Meksiko (2010). Kontribusi pemuda dinilai penting sebab mereka merupakan penerus bagi negosiator Indonesia dalam perubahan iklim.

Keberadaan Delegasi Anak dan Pemuda Indonesia dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP-17) di Durban, Afrika Selatan, menjadi daya tarik tersendiri yang tak terlupakan bagi delegasi negara lain. Delegasi tersebut juga menarik perhatian The United Nations Children's Fund (UNICEF), Studio The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan sebuah televisi India untuk mewawancarai mereka.



Delegasi muda memeriahkan peluncuran buku Bp. Rachmat Witoelar

Delegasi Anak dan Pemuda Indonesia terdiri dari Adelin Abas (Gorontalo), Adeline Suwana (DKI Jakarta), Atika Astrini (Sulawesi), Bonni Chaniago (Jambi), Dina Danomira (Papua), Ferry Setyawan (Jawa Tengah), Hadi Al Rasyid (Sumatera Barat), Maya Susanti (Sumatera Selatan), Mirantha Kristanty (Kalimantan Tengah), Nada Zuhaira (Jawa Barat), Nadia Syifa (DKI Jakarta), Nugroho Wiratama (Jawa Timur), dan Denia Syam (Jawa Barat). "Mereka terpilih karena dinilai konsisten dalam kegiatan terkait lingkungan hidup, berpengalaman memimpin komunitas, mampu berbahasa Inggris, serta memiliki kepedulian terhadap masalah kehutanan," kata Dr. Amanda Katili Niode dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Sebelum berangkat ke Durban, delegasi pemuda mendapat pembekalan selama tiga hari. Topik materi pembekalan meliputi

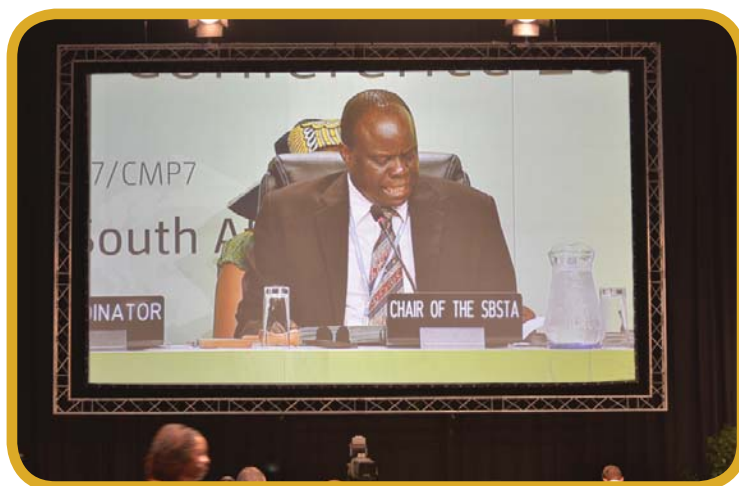
perubahan iklim dan dampaknya, Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) dan proses negosiasinya, diplomasi internasional, kebudayaan Indonesia, serta komunikasi isu perubahan iklim melalui penulisan, fotografi, dan videografi. Dengan bimbingan negosiator Indonesia, delegasi muda mengunjungi dan berinteraksi di berbagai paviliun, serta mengikuti acara tambahan (*side event*) dan acara paralel (*parallel event*) di dalam kompleks kegiatan COP 17. Beberapa di antaranya adalah Rapat Paripurna Delegasi Republik Indonesia serta acara YOUNGO (Youth Constituency). Sebagai konstituen, pemuda Indonesia menjadi pemangku kepentingan dalam proses negosiasi UNFCCC.

Sepulang dari Durban, Delegasi Anak dan Pemuda Indonesia menghitung emisi karbon yang mereka keluarkan untuk perjalanan ke Durban dan mengganti karbon

yang keluar itu (*carbon offset*) melalui penanaman pohon. Mereka juga akan melakukan beberapa kegiatan selama satu tahun ke depan, termasuk membinajaringan internasional yang terbentuk melalui interaksi di Durban, antara lain dengan badan PBB, lembaga swadaya masyarakat internasional, serta sesama delegasi anak dan pemuda dari berbagai negara. "Peserta diharapkan menjadi agen perubahan dalam komunitas masing-masing, melalui presentasi tentang perubahan iklim dan pelibatan warga di beberapa kegiatan berskala regional, nasional, dan internasional," kata Amanda.

“REDD+ Belum Final, Masih Proses”

Berkaitan dengan Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP), Badan Penunjang untuk Saran Ilmiah dan Teknologi (SBSTA) berperan penting mendukung pekerjaan para negosiator melalui penyediaan saran yang tepat terkait hal-hal ilmiah dan teknologi. Sementara itu, Kelompok Kerja Ad-Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (AWG-LCA) berperan dalam melakukan proses pelaksanaan Konvensi melalui aksi kerja sama jangka panjang. Terkait kedua forum ini, Bapak Tazwin Hanif, Ketua Tim Negosiasi Republik Indonesia pada COP 17 di Durban, Afrika Selatan, memberikan pandangannya seputar perkembangan negosiasi di SBSTA dan AWG-LCA, terutama terkait Pengurangan Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+).



Richard Muyungi dari Tanzania mengetuai forum SBSTA

Bisa Anda jelaskan apa itu SBSTA dan AWG-LCA dalam konteks Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC)?

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) adalah sebuah organ Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang merupakan bagian dari *Conference of Parties* (COP atau Konferensi para Pihak) yang bersidang setahun sekali. Nah, di bawah COP itu ada dua organ penunjang (*subsidiary bodies*), yaitu SBSTA dan *Subsidiary Body for Implementation* (SBI atau Badan Penunjang Implementasi).

SBSTA bertugas membahas isu-isu perubahan iklim bersifat teknis, ilmiah, dan metodologis, yang sudah diputuskan COP. Berdasarkan bahasan itu, SBSTA melahirkan draf keputusan. Draft inilah yang selanjutnya dibahas di

dalam COP untuk mendapatkan persetujuan. Jadi, ini membentuk semacam siklus. SBSTA bertemu dua kali dalam setahun. Pada Juni 2011, dilakukan pertemuan pertama di Bonn, Jerman, dan yang kedua pada COP 17 di Durban, Afrika Selatan. Dari dua pertemuan tersebut, SBSTA harus mengeluarkan draf keputusan yang kemudian akan disahkan oleh COP. Jadi, SBSTA tak mungkin bekerja tanpa ada keputusan dari COP. Sebab, SBSTA merupakan badan yang dibentuk untuk membantu COP.

Sementara itu, Kelompok Kerja Ad-Hoc untuk Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (AWG-LCA) merupakan badan negosiasi yang bersifat sementara. Ia dibentuk untuk menegosiasikan hasil-hasil yang disepakati dalam *Bali Action Plan* ketika pelaksanaan COP 13 di Bali (2007). Jadi AWG-LCA merupakan wadah negosiasi

hasil-hasil *Bali Action Plan*. Sifatnya sementara tergantung mandat yang diberikan COP. Kalau sudah selesai, mandat AWG-LCA berakhir di tahun 2012. Mandat baru bisa diberikan tergantung pada ada atau tidaknya isu yang masih harus diselesaikan. Seperti pada COP 15 di Copenhagen, Denmark, (2009), target keputusan ternyata tidak selesai. Jadi, AWG-LCA pun diperpanjang hingga 2010, dan begitu seterusnya hingga 2012.

Terkait REDD+, mandat apa saja yang dikerjakan di SBSTA?

Sesuai amanat COP 16 di Cancún, Meksiko (2010), SBSTA mendapat mandat untuk merumuskan isu-isu teknis dan metodologis dari mekanisme REDD+, antara lain Tingkat Referensi Emisi (*reference emissions levels/REL*) dan Tingkat Referensi (*reference levels/RL*). Selain itu, SBSTA juga membahas metodologi kerangka pengaman



(safeguard). Untuk isu-isu yang bersifat implementasi, seperti opsi pendanaan, dibahas di AWG-LCA sesuai mandat COP.

Sejauh mana perkembangan negosiasi yang berkaitan dengan REDD+, baik dalam SBSTA maupun AWG-LCA?

REDD+ itu belum mendapatkan keputusan final. Semuanya masih dalam tahap proses, termasuk tentang pendanaan. Beberapa negara bahkan tak sepakat jika opsi pendanaan dibahas hingga tahap tertentu. Setelah COP 16 di Cancún, Meksiko (2010), negara-negara pihak diberi kesempatan mengeksplorasi opsi-opsi pendanaannya. Pada COP 17 di Durban (2011), dibukalah opsi pendanaan REDD+ untuk pasardan non-pasar. Dalam negosiasi, tak ada negara yang bisa memaksakan kehendak kepada negara lain. Semua harus mencari kompromi

untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya, tak mustahil jika opsi yang disepakati justru yang paling rendah nilainya.

Dalam hal ini, REDD+ tidak menjadi isu semua negara. Hanya sekitar 30 negara yang memusatkan perhatian pada REDD+, dan yang paling banyak justru negara maju. Negara-negara kepulauan kecil menolak isu REDD+ dalam konteks pasar. Mereka menganggap isu REDD+ dipakai negara maju untuk mengabaikan kewajiban mereka terkait komitmen pengurangan emisi.

Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Di dalam negeri kita sendiri belum ada persepsi yang sama dalam menghadapi REDD+. Pada awalnya, REDD+ dibentuk di Montréal, Kanada, pada COP 11 (2005), melalui proposal Papua Nugini bersama Koalisi Negara

Hutan Tropis (*Rainforest Coalition Countries*). REDD+ sebenarnya memberi peluang dalam konteks negosiasi perubahan iklim karena terkait hutan, ada negara yang melakukan deforestasi tapi ada juga negara yang mempertahankan hutan. Sebelum COP 13 di Bali (2007), tak ada mekanisme pemberian insentif bagi negarayang mempertahankan hutannya. Oleh sebab itu, REDD+ menciptakan ruang negosiasi untuk memberi kepastian kepada negara berkembang yang bisa meningkatkan stok karbonnya. Namun yang menjadi perdebatan selama ini adalah bentuk insentif itu sendiri. Ada negara maju yang menyediakan pendanaan publik dan investasi swasta, tapi lebih banyak negara maju yang memilih mekanisme pasar. Hal inilah yang ditolak banyak negara berkembang kepulauan, dan masih menjadi bagian dari negosiasi REDD+ sampai saat ini.

Kabar UN-REDD Programme Indonesia

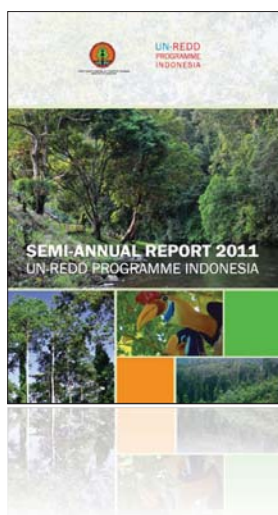
- Selamat Tahun Baru Imlek dari keluarga besar UN-REDD Programme Indonesia. Semoga sukses menyertai kita semua di tahun baru ini.



- Sejak tanggal 21 November 2011, Martha Maulidia bergabung dengan Food & Agriculture Organization (FAO) sebagai Technical Officer UN-REDD di Indonesia. Pendetang baru lainnya adalah Andri Akbar Marthen yang bergabung sebagai United Nations Environment Programme National Officer sejak tanggal 8 November 2011. Selamat datang Martha dan Andri di keluarga besar UN-REDD Programme Indonesia!



Publikasi Terbaru



Sejak bulan November 2011 sampai dengan Januari 2012, UN-REDD Programme Indonesia mengeluarkan beberapa publikasi berikut:

- Buku *Laporan Semi-Tahunan 2011* (sementara hanya versi Inggris)



- Buku *Kesiapan Sulawesi Tengah untuk Implementasi REDD+ setelah 2012* (sementara hanya versi Inggris)



- Brosur *Tanya-Jawab tentang Provinsi Percontohan UN-REDD Programme Indonesia: Sulawesi Tengah* (sementara hanya versi Inggris)

Publikasi ini dapat diperoleh di kantor Programme Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia.

Hubungi kami :

Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV, Lantai 5, Ruang 525C
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5795 1505
Faks: +62 21 574 6748

atau silakan kirim e-mail ke:

info@un-redd.or.id

Untuk informasi lebih lanjut tentang
UN-REDD Programme Indonesia
kunjungi : www.un-redd.or.id

Kerja sama antara:



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEMENTERIAN KEHUTANAN RI



UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA